

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Pembangunan” adalah kata kunci terpenting dalam pemerintahan sebuah negara.¹ Pembangunan sejak lama telah menjadi tema sentral dan menempati posisi vital dalam dinamika peradaban modern, baik dalam aspek sosial-budaya, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks historis, pembangunan sering dipandang sebagai jalan utama untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertinggalan yang terjadi di negara-negara berkembang. Pembangunan dianggap sebagai agama baru yang mampu memberikan harapan akan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ia tidak hanya dimaknai sebagai proses ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga proyek historis yang diharapkan mampu mendorong modernisasi dan transformasi sosial. Namun, sesuai perkembangan zaman, terjadi begitu banyak pergeseran konsep dan makna tentang pembangunan. Realitas memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu menjamin hasil yang memuaskan; sebaliknya, kerap melahirkan paradoks berupa berbagai ketimpangan, marginalisasi, hingga krisis sosio-ekologis. Konsep pembangunan berkelanjutan pun menjadi pilihan utama banyak negara untuk mengatasi berbagai ketimpangan dalam pembangunan, dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.²

Dalam kerangka ini, penggunaan energi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sektor energi pun menempati posisi yang sangat strategis dalam diskursus pembangunan. Ia

¹ Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3.

² Heppi Syofya dkk., *Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), hlm. 1-3.

tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan teknis untuk menunjang aktivitas manusia, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu bangsa. Karena itu, penyediaan energi yang adil, berkelanjutan, dan dapat diakses secara merata menjadi syarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan sektor industri, serta mendukung keberlangsungan pembangunan yang inklusif dan manusiawi.³ Dalam konteks global, krisis iklim, meningkatnya suhu bumi, kebutuhan akan energi yang semakin tinggi, serta semakin menipisnya cadangan energi fosil menggerakkan berbagai negara untuk melakukan transisi menuju energi terbarukan. Proses transisi energi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memastikan adanya keberlanjutan dalam pembangunan. Penggunaan energi terbarukan dalam transisi energi memiliki banyak manfaat, seperti: meminimalisir efek pemanasan global, mendukung proses pembangunan sosial dan lingkungan hidup, menunjang perekonomian, meningkatkan kesehatan masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang.⁴ Sebagai negara tropis dengan karakteristik geografis kepulauan, Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan yang tersebar di hampir seluruh wilayah, salah satunya ialah energi panas bumi.

Berada di area jalur gunung berapi dan pertemuan lempeng dunia, Indonesia menyimpan 40% cadangan panas bumi dunia.⁵ Dengan kapasitas panas bumi yang cukup memadai ini, Indonesia pun menempati posisi yang strategis dalam agenda transisi energi global. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total potensi panas bumi Indonesia

³ Halomoan Hutajulu, *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 101.

⁴ Lilies Setiartiti dan Rahmat Adiprasetya Al-Hasibi, *Monograf Transisi Energi Terbarukan untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2024), hlm. 31.

⁵ *Ibid*, hlm. 40.

diperkirakan hingga 23,7 GW.⁶ Dengan potensi sebesar ini, Indonesia diproyeksikan menjadi pemain kunci dalam pengembangan energi panas bumi dalam skala regional, nasional maupun internasional. Hal ini pastinya sehaluan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menargetkan *net zero emissions* pada tahun 2060, dengan mengidealkan masa depan yang rendah karbon dan tangguh iklim.⁷ Target yang luar biasa dan ambisius ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 (Visi Indonesia Emas). Untuk itu, pemerintah Indonesia mengedepankan bauran energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di mana energi panas bumi menjadi salah satu opsi utama. Dengan demikian, transisi energi bukan hanya soal teknis semata, melainkan juga terintegrasi dalam agenda politik pembangunan, karena menyangkut bagaimana negara mengelola sumber daya yang ada, memobilisasi investasi dengan baik, serta mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi.

Dalam kerangka ini, Pulau Flores memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong transisi energi dalam skala regional maupun nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2268 K/MEM/2017, Flores resmi ditetapkan sebagai “Pulau Panas Bumi.”⁸ Penetapan ini bukan sekadar label administratif belaka, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk menjadikan Flores sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan nasional. Total potensi sumber daya panas bumi di pulau ini mencapai hampir 1.000 MW, dengan cadangan mencapai sekitar 402,5 MW. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan energi lokal saat ini, sehingga

⁶ Jatna Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 325.

⁷ Indria Wahyuni, *Indonesia's Policy and Regulation of Geothermal Energy-Optimising Geothermal Utilization* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 15.

⁸ Kementerian ESDM, “Keputusan Menteri ESDM NO. 2268 K/MEM/2017 tentang Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi”, dalam [esdm.go.id](https://jdih.esdm.go.id), <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/kepmen-esdm-2268+Th+2017.pdf>, diakses pada 24 September 2025, hlm. 3.

Flores diproyeksikan tidak hanya mandiri energi dalam konteks regional, tetapi juga berkontribusi besar pada pasokan listrik ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Salah satu proyek yang ditetapkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu 5-6 di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, NTT. Proyek geotermal di pegunungan Poco Leok bakal menyebar pada 60 titik pengeboran, terletak di 13 kampung adat dalam 3 desa, yaitu, Desa Lungar, Mocok, dan Golo Muntas.⁹ Proyek PLTP Poco Leok ini merupakan salah satu upaya transisi energi untuk memenuhi tujuan *net zero emissions* pada 2060, sekaligus mewujudkan kemandirian energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Manggarai. Proyek ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemkab Manggarai, dikerjakan oleh PT PLN (Persero) dengan dukungan pendanaan dari lembaga internasional, yakni Bank Jerman (KfW). Dengan kapasitas pengembangan tahap lanjutan mencapai 40 MW, PLTP Ulumbu dipandang sebagai proyek penting dalam memenuhi target bauran energi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, pelaksanaan proyek PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok sejak awal menuai dinamika sosial berupa pro-kontra yang tajam dan pelik, bahkan memicu konflik yang berkepanjangan. Pro-kontra ini dapat ditemukan dari beberapa aksi demonstrasi yang diutarakan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana proyek. Pihak Pemerintah dan PLN menekankan manfaat ekonomis dan ekologis dari proyek ini sebagai bagian dari upaya transisi energi yang memanfaatkan energi baru terbarukan. Dalil yang digagas bahwa proyek panas bumi akan memperluas akses listrik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, proyek ini dipandang sebagai langkah konkret dalam mengurangi emisi karbon menuju *net zero emissions* tahun 2060,

⁹ Anno Susabun, "Was-Was Panas Bumi Rusak Ruang Hidup Warga Poco Leok" dalam *Mongabay.co.id*, 03 Agustus 2023, <https://mongabay.co.id/2023/03/08/was-was-panas-bumi-rusak-ruang-hidup-warga-poco-leok>, diakses pada 24 September 2025.

menciptakan energi bersih dan memperkuat ketahanan energi dalam skala nasional.¹⁰ Di sisi lain, upaya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan ini berhadapan dengan berbagai penolakan warga yang khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Sebagian besar masyarakat adat Poco Leok justru menolak keras proyek ini. Bagi mereka, proyek panas bumi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan, seperti: kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, kerusakan lahan pertanian, serta mengganggu keberlangsungan alam yang selama ini dijaga melalui praktik sosiokultural. Lebih dari itu, proyek ini dianggap mengancam keberlangsungan tanah ulayat yang memiliki nilai sakral dan historis yang vital.¹¹ Kekhawatiran masyarakat ini tentunya berdasar pada pembangunan proyek geotermal di beberapa tempat lain, salah satunya di Mataloko. Proyek geotermal Mataloko yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1998 telah menimbulkan begitu banyak kerugian, mulai dari kerusakan lingkungan, terganggunya sumber air, perubahan sistem ekonomi lokal, dan masalah kesehatan.¹² Selain itu, operasi tambang di Mataloko juga menyemburkan lumpur panas yang mengakibatkan sawah warga terendam dan sumber air tercemar di mana-mana.

Penolakan ini pun diperparah oleh pendekatan komunikasi pemerintah yang dianggap mengabaikan prinsip dialogis dan keterlibatan aktif masyarakat.¹³ Sejak tahun 2017, masyarakat sudah mulai menunjukkan penolakan yang tegas terhadap proyek geotermal. Penolakan pun semakin menajam setelah Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, mengeluarkan

¹⁰ Murwani Dewi Wijayanti, *Energi Panas Bumi* (Jakarta Timur: PT Bumi Askari, 2023), hlm. 5.

¹¹ Ebed De Rosary, "Warga Tolak Proyek Geotermal Poco Leok, Ini Alasannya", dalam *Mongabay.co.id*, 23 Maret 2023, <https://mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geotermal-poco-leok-ini-alasannya/>, diakses pada 26 September 2025.

¹² Alfian Tanggang dan Theodor A. P. Bala Lajar, "Bumi Sebagai Rumah: Kritikan Terhadap Proyek Geotermal Poco Leok dan Mataloko dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si" dalam *Vox Ledalero* 72:1 (2024), hlm. 86-87.

¹³ Humas Indonesia, "Konflik Geothermal Poco Leok: Cerminan Gagalnya Komunikasi Pemerintah", dalam humasindonesia.id 31 Juli 2025, dalam <https://humasindonesia.id/berita/konflik-geothermal-poco-leok-cerminan-gagalnya-komunikasi-pemerintah-2885>, diakses pada 26 September 2025.

surat keputusan penetapan lokasi tanpa persetujuan warga pada tahun 2022. Masyarakat mengklaim bahwa pemerintah telah mengambil keputusan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat. Bagi masyarakat, proyek ini hadir sebagai bentuk *top-down development* yang dipaksakan tanpa memberikan legitimasi akan suara dan hak masyarakat adat.

Situasi semakin rumit ketika pemerintah menampilkan wajah represif terhadap warga yang hendak menggagalkan pematokan lahan. Pemerintah daerah mengerahkan aparat keamanan gabungan untuk mengamankan proses pengukuran dan identifikasi di lapangan. Sebagaimana yang terjadi di awal bulan Oktober 2024, masyarakat berbentrokkan dengan aparat keamanan yang memaksa masuk ke wilayah proyek.¹⁴ Penggunaan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan itu pun berujung pada bentrokkan dan intimidasi kepada warga, hingga terjadi penyerangan yang menyebabkan beberapa warga terluka. Kemudian diikuti dengan penangkapan 3 warga dan 1 jurnalis secara sewenang-wenang. Warga dari sepuluh komunitas adat menggagalkan pematokan tersebut dan menilai tindakan pemerintah sebagai bentuk intimidasi serta pengabaian terhadap hak adat. Insiden ini menunjukkan bahwa persoalan geothermal Poco Leok bukan hanya soal teknis energi, tetapi telah menyentuh ranah yang lebih kompleks, seperti: legitimasi sosial, hak masyarakat adat, dan prinsip keadilan pembangunan berkelanjutan.

Fenomena konflik di Poco Leok ini dapat dipahami melalui kerangka politik pembangunan, yakni bagaimana negara menggunakan kekuasaan dan kebijakan untuk mendorong agenda pembangunan. Politik pembangunan dalam praktiknya sering kali identik dengan pendekatan *top-down*, di mana pemerintah sebagai pemberi arahan memaksakan program pembangunan

¹⁴ Fransiskus Pati Herin, "Wartawan Disekap dan Warga Ditendang Aparat, Poco Leok di Manggarai Memanas" dalam *Kompas.id*, 03 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/03/wartawan-disekap-dan-warga-ditendang-aparat-poco-leok-di-manggarai-memanas>, diakses pada 26 September 2025.

atas nama modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara realitas sosial-budaya dan keterlibatan masyarakat lokal kurang diperhatikan dengan baik. Banyak kebijakan pembangunan berkelanjutan sering kali hanya memperkuat *status quo* dan mengabaikan ketidakadilan sosial yang ada.¹⁵ Pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur tanpa mempertimbangkan secara bijaksana perubahan aspek sosial-budaya yang mendalam akan terjebak dalam logika kapitalisme. Situasi semacam ini dapat dibaca dalam pemikiran Michel Foucault, di mana negara bertindak sebagai otoritas epistemik yang memonopoli definisi kebenaran kebijakan, sementara kehadiran masyarakat hanya dipandang sebagai sumber data pasif, sehingga berujung pada marginalisasi akses terhadap sumber daya serta hak masyarakat untuk menyuarakan realitas hidup.¹⁶ Program pembangunan ini dirancang agar terlihat rasional dan efisien di atas kertas, tetapi realitas menunjukkan bahwa proyek ini sering menimbulkan berbagai ketimpangan dan kerentanan dalam banyak dimensi kehidupan. Kasus Poco Leok memperlihatkan logika tersebut: negara memandang proyek panas bumi sebagai solusi transisi energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat adat melihatnya sebagai ancaman terhadap kosmologi dan tatanan sosial-budaya mereka.

Historisitas pembangunan Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi memperlihatkan bahwa paradigma pembangunan sering bersifat *top-down* dan gagal menjawab kebutuhan rakyat kecil.¹⁷ Masa Orde Lama terhambat oleh situasi politik yang tidak stabil, Orde Baru lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan pola *trickle-down effect* yang justru melahirkan begitu banyak kesenjangan, sedangkan Masa Reformasi

¹⁵ Brian L. Djumaty dkk., *Pengantar Sosiologi Konsep dan Praktik* (Bandung: Penerbit Widina, 2025), hlm. 179.

¹⁶ Muhammad Andry Mukmin, "Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapitalisme Relasional" dalam *Jurnal Filsafat Indonesia* 8:2 (2025), hlm. 303.

¹⁷ Renny Puteri Harapan Rani, "Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia: dari Orde Lama hingga Reformasi." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1:1 (November 2020), hlm. 42-45.

lebih demokratis namun masih sarat akan korupsi dan ketimpangan yang terjadi. Kritik utama terhadap pola pembangunan lama ini ialah terabainya partisipasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan yang seimbang. Karena itu, paradigma pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan secara matang dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dipandang lebih tepat untuk diimplementasikan. Namun, dalam konteks proyek geotermal Poco Leok, dinamika pro-kontra yang muncul mencerminkan tantangan lama pola pembangunan Indonesia: dominasi negara, lemahnya partisipasi masyarakat, dan potensi ketidakadilan sosial-ekologis. Dalam hal ini, konflik Poco Leok bukan hanya benturan kepentingan ekonomi semata, melainkan juga konflik paradigma antara narasi pembangunan yang digagas negara dan kosmologi lokal yang dipertahankan masyarakat adat setempat. Di satu sisi, negara mengkonstruksi pembangunan dengan dalih menuju *net zero emissions*, energi bersih, dan ekonomi maju. Di sisi lain, masyarakat adat mengkonstruksi tanah ulayat sebagai warisan sakral yang tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai komoditas energi.

Dalam perspektif Thomas Kuhn, fenomena ini dapat dibaca sebagai pergeseran paradigma (*Paradigm Shift*) dalam diskursus pembangunan.¹⁸ Historisitas menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan beberapa pola pembangunan dengan ciri khasnya masing-masing. Namun, terjadi begitu banyak ketimpangan dalam setiap pelaksanaannya, di mana aspek pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor dominan. Paradigma semacam ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek rembesan ke bawah (*trickle down effect*). Namun, realitas menunjukkan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi sering kali gagal menjawab berbagai persoalan, seperti: kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan ekologis di negara-negara berkembang. Kebanyakan paradigma pertumbuhan ekonomi negara

¹⁸ Ulfa Kesuma dan Ahmad Wahyu Hidayat, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma" dalam *Jurnal Pemikiran Islam* 21:2 (September 2020), hlm. 177.

berkembang, termasuk Indonesia, lebih menempatkan manusia sebagai objek, bukan subjek dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan penderitaan sosial, ekologis, dan kultural yang besar. Dengan demikian, paradigma pembangunan yang terlalu menekankan aspek ekonomi dinilai tidak memadai untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Pemikiran Peter L. Berger memberi kerangka analisis yang tajam dan komprehensif untuk membaca konflik ini. Dalam bukunya *The Social Construction of Reality* (1991), Berger bersama Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses dialektis yang terus berlangsung, yang terdiri dari 3 langkah penting: eksternalisasi (manusia menciptakan dunia sosialnya), objektivasi (dunia sosial menjadi nyata dan independen), dan internalisasi (individu mempelajari dan mengadopsi realitas sosial yang telah terbentuk melalui sosialisasi).¹⁹ Dalam konteks fenomena sosial, ketiga langkah penting ini tidak hanya dipahami sebagai urutan yang terjadi secara temporal belaka. Sebaliknya, masyarakat dan setiap bagiannya secara bersamaan memiliki ketiga ciri tersebut, sehingga setiap analisis yang hanya menyoroti satu atau dua di antaranya akan selalu tidak lengkap. Ketiga proses ini saling berhubungan sehingga menjadi bagian penting dari masyarakat. Dalam konteks Poco Leok, negara melakukan eksternalisasi melalui kebijakan dan proyek pembangunan yang memosisikan panas bumi sebagai energi terbarukan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan energi bersih, dan membuka lapangan pekerjaan. Narasi ini pun diobjektifikasi melalui regulasi, perencanaan proyek, serta keterlibatan institusi nasional maupun internasional. Masyarakat kemudian diharapkan menginternalisasi narasi ini sebagai realitas objektif, di mana dalih yang digagas pemerintah menjadi suatu langkah solutif yang baik. Namun, masyarakat adat Poco Leok memiliki konstruksi realitas yang berbeda. Bagi mereka, tanah Poco Leok

¹⁹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (England: Penguin Books Ltd, 1991), hlm. 149-150.

bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatukan dimensi ekologis, sosial, budaya dan spiritual. Karena itu, proyek geotermal justru ditafsirkan sebagai ancaman eksistensial. Pertentangan konstruksi realitas inilah yang menimbulkan konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Perspektif ini semakin jelas bila ditinjau dari perspektif masyarakat modern dan masyarakat tradisional terhadap waktu. Berger menegaskan bahwa masyarakat modern sangat menekankan orientasi pada masa depan serta pembagian waktu ke unit-unit terukur yang menjadi dasar aktivitas sehari-hari.²⁰ Hal ini berbeda dengan masyarakat tradisional yang menjadikan masa lampau sebagai pedoman tingkah laku masa kini. Dalam konteks Poco Leok, perbedaan orientasi itu tampak nyata: negara, dengan logika modernitasnya, melihat pembangunan energi panas bumi sebagai investasi masa depan menuju transisi energi yang diidealkan, sedangkan masyarakat adat menafsirkan tanah ulayat melalui memori masa lampau, tradisi, dan nilai historis-sakral yang diwariskan leluhur. Kontras ini memperdalam jurang perbedaan paradigma pembangunan di antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui bukunya *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*, Berger mengkritisi dilema pembangunan di negara berkembang. Ia mengkritik baik kapitalisme maupun sosialisme karena sama-sama menyisakan “kalkulus penderitaan”—yakni pengorbanan manusia yang tak jarang dituntut demi tercapainya tujuan pembangunan. Ia menekankan dua kriteria etis dalam menilai kebijakan pembangunan: *Calculus of Pain* dan *Calculus of Meaning*. *Calculus of pain* menekankan perlunya menghitung penderitaan manusia akibat pembangunan.²¹ Dalam kasus Poco Leok, penderitaan itu tampak dalam potensi kehilangan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial dengan negara. Sementara *Calculus of*

²⁰ Bernard Raho, *Sosiologi* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 361.

²¹ Peter L. Berger, *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change* (New York: Anchor Books, 1976), hlm. 149-151.

meaning menyoroti pentingnya menjaga makna kultural dan spiritual.²² Dalam kerangka ini, manusia memiliki hak untuk hidup dalam dunia yang bermakna, di mana makna itu diproyeksikan ke dalam alam semesta. Pemenuhan akan hak ini merupakan kewajiban moral dalam setiap kebijakan yang digagas. Bagi masyarakat adat, tanah adalah simbol identitas sekaligus medium relasi dengan leluhur dan alam semesta. Pembangunan yang mengabaikan dimensi ini akan kehilangan legitimasi moral, serta makna kultural dan spiritual yang sudah dipertahankan turun-temurun. Dengan demikian, pembangunan yang tidak mempertimbangkan kedua kalkulasi tersebut akan menimbulkan pengorbanan sosial-budaya yang besar dan akan gagal memenuhi orientasi humanis dan ekologis dalam pembangunan.

Pemikiran Berger ini relevan dengan kritik kapitalisme dan pola pembangunan di Indonesia, khususnya di NTT. Kapitalisme cenderung menekankan efisiensi, komodifikasi, dan akumulasi kapital, sementara negara sering kali bertindak sebagai fasilitator kepentingan modal global.²³ Proyek geothermal Poco Leok dapat dipahami sebagai bagian dari logika pasar internasional dalam mengelola sumber daya energi terbarukan. Energi panas bumi diposisikan sebagai komoditas strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi dan target *net zero emissions*. Namun, bagi masyarakat adat, tanah bukanlah komoditas, melainkan warisan leluhur yang bersifat sakral. Perbedaan paradigma ini menimbulkan benturan tajam antara logika kapitalisme pembangunan dan kosmologi lokal masyarakat.

Studi Bernardus Badj tentang pembangunan pariwisata di Labuan Bajo memperlihatkan pola serupa.²⁴ Pembangunan infrastruktur megah di kawasan wisata tersebut lebih menguntungkan pihak investor dibanding masyarakat setempat. Dampak yang muncul adalah perampasan sumber

²² *Ibid*, hlm. 183-184.

²³ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 32-34

²⁴ Bernardus Badj, "Relevansi Etika Politik Peter L. Berger bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia" dalam *Lumen Veritates: Jurnal Filsafat dan Teologi* 15:2 (Oktober 2024), hlm. 199-200.

daya secara halus, adanya dominasi, marjinalisasi masyarakat, hilangnya ruang hidup, dan pergeseran nilai-nilai sosial-budaya. Hal ini menunjukkan bahwa model pembangunan di NTT sering kali lebih mengutamakan kepentingan pihak investor (eksternal) ketimbang kesejahteraan masyarakat lokal. Senada dengan itu, penelitian Aziz dkk, menegaskan bahwa pola pembangunan di Indonesia masih cenderung elitis dan *state-centric*, sehingga kebijakan yang digagas sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat akar rumput.²⁵ Dalam banyak kasus, pembangunan tidak sekadar menimbulkan kesenjangan ekonomi, melainkan juga dilema ekologis dan sosiokultural, sebagaimana yang terjadi pada kasus geotermal Poco Leok.

Selain dimensi ekonomi dan politik, aspek religius juga berperan besar dalam resistensi masyarakat adat Poco Leok. Peter L. Berger dalam bukunya *The Sacred Canopy (1967)* menekankan bahwa agama berfungsi sebagai “kanopi sakral” yang memberi legitimasi moral dan makna atas realitas sosial.²⁶ Dalam konteks Poco Leok, masyarakat adat menjadikan agama, kosmologi, dan tradisi spiritual sebagai dasar penolakan terhadap proyek geotermal. Bagi mereka, tanah ulayat adalah ruang relasi dengan leluhur dan bagian dari kosmos yang harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, pembangunan yang dianggap mengganggu tatanan kosmis dan merusak nilai sakral tanah tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa proyek geotermal Poco Leok bukan sekadar persoalan teknis penyediaan energi, melainkan isu multidimensional yang kompleks, seperti: sosial, lingkungan, budaya, politik, ekonomi, dan religius. Negara melalui PLN dan kebijakan energi nasional mengonstruksi pembangunan sebagai wujud modernisasi dan upaya transisi

²⁵ Akmal Aziz dkk., “Analisis Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia” dalam *Prosiding the 11th Seminar Nasional ADPI Mengabdikan untuk Negeri*, 6:1 (2025), hlm.7-8.

²⁶ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), hlm. 25.

energi menggunakan energi terbarukan menuju *net zero emissions*. Namun, konstruksi ini berbenturan dengan realitas masyarakat adat yang memandang tanah sebagai entitas sakral, identitas kolektif, dan sumber kehidupan yang tidak bisa digantikan.

Pelaksanaan proyek geothermal Poco Leok Manggarai menggambarkan kritik Peter L. Berger terhadap pembangunan yang cenderung melayani kepentingan elit dan mengabaikan suara serta penderitaan masyarakat lokal. Fokus pada kesejahteraan masa depan dan profit ekonomi menunjukkan bagaimana pembangunan dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sementara dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan saat ini kurang dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian, kasus ini menegaskan relevansi pandangan Berger tentang bagaimana pembangunan dapat menjadi instrumen dominasi yang mereduksi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kemajuan yang benar-benar inklusif. Perspektif Berger ini mampu membaca pembangunan bukan hanya sebagai proses ekonomi dan teknokratis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang mengandung biaya-biaya manusiawi. Melalui pendekatan dialektika negatif, Berger membantu menjelaskan bagaimana konflik energi di wilayah adat, termasuk di Poco Leok, lahir dari benturan antara agenda pembangunan negara dan realitas kehidupan masyarakat lokal yang mempertahankan ruang hidup, identitas budaya, dan sistem makna mereka.

Secara akademis, penelitian ini penting karena membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik pembangunan di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif Berger, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian politik pembangunan, khususnya terkait hubungan antara negara, masyarakat adat, dan dinamika kapitalisme global. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberi sumbangsih praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan kritis terhadap konteks lokal.

Berdasarkan kajian di atas, penulis tertarik untuk mengelaborasi gagasan pembangunan Peter L. Berger dalam mengkritisi pelaksanaan

proyek geotermal Poco Leok, di bawah judul: **“PROYEK GEOTERMAL POCO LEOK, MANGGARAI DALAM PERSPEKTIF POLITIK PEMBANGUNAN PETER L. BERGER”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, persoalan pokok yang hendak diulas dalam karya ilmiah ini adalah: “Bagaimana proyek geotermal Poco Leok, Manggarai ditinjau dari perspektif Politik Pembangunan Peter L. Berger?”

Pertanyaan pokok ini kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gambaran umum proyek geotermal Poco Leok dan dinamika sosial-politik yang menyertainya?
2. Bagaimana politik pembangunan dipahami menurut pemikiran Peter L. Berger?
3. Bagaimana kritik Berger terhadap ideologi pembangunan kapitalisme dan sosialisme relevan untuk menganalisis proyek geotermal Poco Leok?
4. Bagaimana proyek geotermal Poco Leok mencerminkan kalkulus penderitaan (*calculus of pain*) dan kalkulus makna (*calculus of meaning*) dalam perspektif politik pembangunan Peter L. Berger?
5. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat adat Poco Leok dalam menghadapi narasi pembangunan negara?
6. Apa peran agama dan budaya dalam konflik pembangunan tersebut menurut perspektif Berger?
7. Apa implikasi pemikiran Berger bagi pengembangan paradigma pembangunan yang lebih adil, manusiawi, dan partisipatif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya tulis ini memiliki beberapa tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan

khusus:

a. Tujuan Umum

Untuk menjelaskan dan menganalisis proyek geothermal Poco Leok Manggarai dalam perspektif Politik Pembangunan Peter L. Berger, serta menguraikan implikasi teoritis maupun praktisnya. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

b. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proyek geothermal Poco Leok beserta pro-kontra yang menyertainya.
2. Menguraikan pemikiran Peter L. Berger mengenai politik pembangunan.
3. Menjelaskan relevansi pemikiran Berger terhadap ideologi pembangunan kapitalisme dan sosialisme dalam menganalisis proyek geothermal Poco Leok.
4. Menganalisis kesesuaian konsep kalkulus penderitaan dan kalkulus makna dalam dinamika konflik geothermal Poco Leok menurut perspektif politik pembangunan Peter L. Berger.
5. Menganalisis konstruksi sosial masyarakat adat Poco Leok dalam menghadapi narasi pembangunan negara.
6. Menganalisis peran agama dan budaya dalam dinamika konflik pembangunan proyek geothermal Poco Leok menurut perspektif Peter L. Berger.
7. Memberikan refleksi akademis dan praktis mengenai alternatif paradigma pembangunan yang lebih manusiawi, kritis, dan partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah: sebagai refleksi kritis dalam menyusun kebijakan pembangunan agar lebih memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan dan manusiawi secara seimbang.

2. Bagi masyarakat: menumbuhkan dan mendorong kesadaran untuk menempatkan diri sebagai subjek dalam pembangunan dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan dasar advokasi berbasis hak asasi manusia.
3. Bagi akademisi: memperkaya literatur mengenai pembangunan dengan perspektif kritis Peter L. Berger, serta mengembangkan kerangka analitis untuk konflik energi di wilayah adat.
4. Bagi Gereja dan lembaga sosial: penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka etis dan teologis dalam menyikapi konflik pembangunan, serta memperkuat peran Gereja Katolik sebagai mediator moral dalam membangun dialog dan pendampingan masyarakat adat.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analisis terhadap polemik geothermal Poco Leok menggunakan teori politik pembangunan Peter L. Berger. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan membaca dan menganalisis pelbagai sumber yang relevan. Berikut prosedur yang ditempuh:

1. Mengumpulkan literatur primer dan sekunder terkait proyek geothermal, teori pembangunan, dan pemikiran Peter L. Berger.
2. Membaca dan menganalisis karya-karya Berger, baik yang berhubungan dengan politik pembangunan, konstruksi sosial, maupun etika sosial.
3. Mengkaji data dari jurnal, buku, laporan resmi, dan media daring terkait proyek geothermal Poco Leok.
4. Menyusun analisis dengan menggunakan perspektif politik pembangunan Berger sebagai kerangka teoritis.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini mencakup lima bab yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembahasan.

Pada Bab I: Pendahuluan, membahas tentang latar belakang pemilihan judul, dengan menyoroti proyek geothermal Poco Leok Manggarai sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang sarat dengan persoalan sosial, budaya, politik, dan ekologis. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dengan demikian, Bab I menjadi fondasi konseptual sekaligus menjelaskan alasan akademis dan praktis di balik tulisan ini.

Pada Bab II: Mengkaji tentang konsep-konsep dasar geothermal dan gagasan politik pembangunan Peter L. Berger. Pada bagian pertama, akan diuraikan tentang gambaran umum proyek geothermal, seperti: pengertian energi geothermal, sejarah dan tahap-tahap perkembangan, dampak dari pengembangan energi geothermal, serta latar belakang kebijakan energi nasional. Pada bagian berikut, akan dipaparkan tentang konsep dasar politik pembangunan Peter L. Berger yang mencakup: riwayat hidup Peter L. Berger, karya-karyanya, dua puluh lima tesisnya, dialetika negatif, gagasan tentang politik pembangunan dalam buku *Piramida Kurban Manusia*, kritiknya terhadap kapitalisme dan sosialisme, mitos pertumbuhan dan mitos revolusi, serta pendasaran pengertian pembangunan.

Pada Bab III: Membahas gambaran singkat tentang Poco Leok dan proyek geothermal Poco Leok. Pada bagian ini, akan diuraikan gambaran umum mengenai Poco Leok, seperti: sejarah, letak geografis, mata pencaharian, sistem bahasa, sistem kepercayaan, sistem perkawinan, lembaga adat, dan perspektif masyarakat Poco Leok terhadap ekologi. Pada bagian berikut, akan dipaparkan posisi Manggarai dalam rencana transisi energi, serta dinamika sosial-politik yang muncul di lapangan, termasuk pro-kontra antara pemerintah, perusahaan, Gereja, dan masyarakat adat.

Pada Bab IV: Berisi pembahasan tentang "Proyek Geothermal Poco

Leok, Manggarai: Analisis Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger”. Di sini akan dipaparkan terkait konsep kalkulus penderitaan (*Calculus of Pain*) dan kalkulus makna (*Calculus of Meaning*) sebagai landasan etis dalam menilai pembangunan, serta relevansi konstruksi sosial realitas Berger bagi masyarakat Dunia Ketiga. Selain itu, dijelaskan juga terkait peran agama dalam memahami realitas pembangunan. Pada bagian berikut, akan diuraikan terkait analisis kasus proyek Geothermal Poco Leok dalam Perspektif Berger, di mana teori Berger diterapkan untuk membaca realitas konflik pembangunan di Poco Leok. Bagian ini akan mengkaji bagaimana proyek geothermal mencerminkan dilema politik pembangunan: antara janji pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan penderitaan masyarakat lokal di sisi lain. Lebih lanjut, akan dibahas juga terkait konstruksi sosial masyarakat adat, peran agama dan budaya dalam menolak proyek, serta implikasi etis dan politis dari perspektif Berger.

Pada Bab V: Merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta catatan kritis. Bagian ini menegaskan kembali kontribusi pemikiran Peter L. Berger dalam memahami politik pembangunan, sekaligus memberikan refleksi mengenai pentingnya paradigma pembangunan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan menghargai martabat masyarakat lokal.